

**MODEL *COLLABORATIV GOVERNANCE* DALAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN
LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH
KABUPATEN PONOROGO**



Oleh :
Herlambang Septa Nugraha
NIM : 14221344

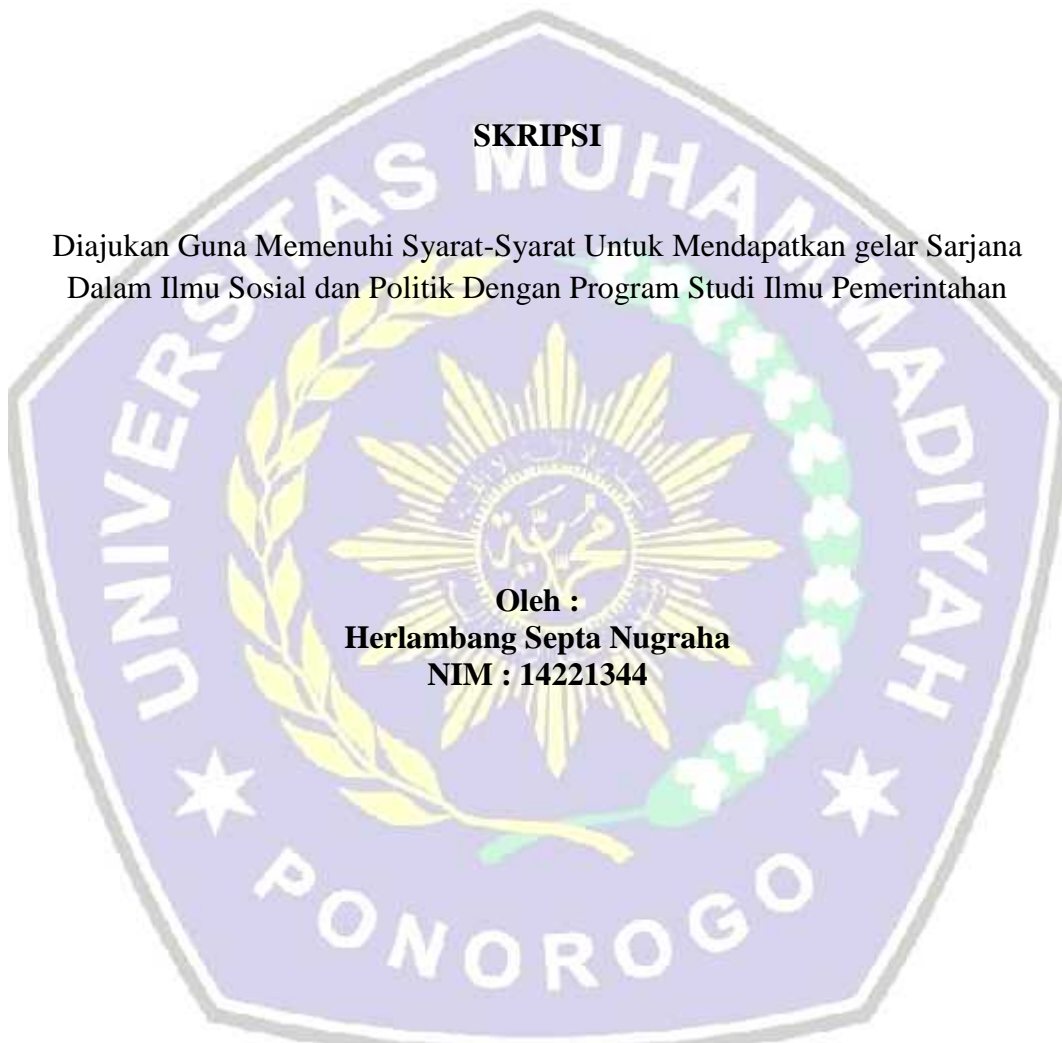
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PONOROGO**

2018

**MODEL *COLLABORATIV GOVERNANCE* DALAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN
LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan gelar Sarjana
Dalam Ilmu Sosial dan Politik Dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :
Herlambang Septa Nugraha
NIM : 14221344

**ROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

PONOROGO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Skripsi ini disusun oleh : Herlambang Septa Nugraha

Dengan Judul : MODEL *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN
PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS
DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO

Pada : 6 Juni 2018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



Yusuf Adam Hilman S.IP., M.Si
NIDN. 0708118802

Ponorogo, 6 Juni 2018

Pembimbing II



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : **MODEL COLLABORATIV GOVERNANCE DALAM
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN
PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS
DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO**

Disusun oleh : Herlambang Septa Nugraha

Telah dipertahankan di depan penguji pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juli 2018

Pukul : 11.30 WIB

DEWAN PENGUJI

Penguji I



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN.0709066403

Penguji II



Robby Darwis Nasution, S.IP,MA
NIDN.0728028603

Penguji III



Yusuf Adam Hilman S.IP., M.Si
NIDN. 0708118802

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. JUSUF HARSONO, M.Si
NIK.19620113 198909 12

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebanggaan karya tulis ini kupersembahkan kepada Ibu dan Bapakku yang senantiasa menyayangi dan membimbing serta membesarkan aku dengan segala kasih dan sayangnya. Semoga Allah menyayanginya.

HERLAMBAANG SEPTA NUGRAHA



MOTTO

"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi."

(Ernest Newman)



ABSTRAK

Strategi pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh meliputi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Kolaborasi menjadi kunci penting agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari Program Kota Tanpa Kumuh. Kabupaten Ponorogo menyumbang 29 Ha sebagaimana dijelaskan melalui Surat Keputusan Bupati Ponorogo no 23 Tahun 2015 tentang pengurangan wilayah kumuh. Kelurahan yang masuk dalam kategori kumuh adalah kelurahan Banyudono, Tamanarum, Jingglong, Pinggirsari dan Kelurahan Paju. Dalam konteks program Kota Tanpa Kumuh kolaborasi dilakukan antara masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat, tenaga pendamping sebagai wakil dari konsultan, pemerintah kelurahan sampai dengan pemerintah Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model *collaborativ governance* dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan teori Miles Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data dilakukan menggunakan metode triangulasi.

Collaborativ Governance yang dijalankan dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan pada Program Kota Tanpa Kumuh berjalan secara efektif dan maksimal. Kolaborasi dilakukan antara personal BKM, TIPP, stakeholders lokal termasuk Pemerintah Kelurahan dan juga Tim Fasilitator dalam baik melalui pendampingan maupun melalui siklus yaitu peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam peningkatan Kapasitas masyarakat tersebut kolaborasi juga dilakukan dengan dinas-dinas terkait melalui sharing knowledge serta program yang berhubungan dengan lingkungan permukiman. *Collaborativ Governance* yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas terjadi dengan baik antar semua pelaku, stakeholders dan masyarakat. Pada tingkat pelaksanaan kolaborasi juga dilakukan dengan pihak perbankan, perusahaan dan juga pihak swasta lainnya. Kolaborasi dalam tahapan ini dilengkapi dengan nota kesepakatan dan dokumen resmi antara BKM dan KSM dengan para kolaborator.

Kata Kunci: *Collaborativ Governance, Kota Tanpa Kumuh, PLPBK, Kelembagaan*

ABSTRACT

The Strategy for Assessment of the Slum Program includes collaboration between the government, the community and the Local Government Work Unit on the prevention and improvement of urban slum quality. Collaboration is the key to achieving what is the goal of the Flawless Town Program. Ponorogo Regency contributes 29 Ha as explained through the Decree of Regent of Ponorogo no 23 of 2015 about slum area reduction. Sub-districts included in the slum category are Banyudono, Tamarum, Jingglong, Pinggirsari and Paju villages. In the context of the City of Immersive program, collaboration is carried out between the community, the Community Self-Help Agency, assistants as representatives of the consultants, the village administration to the district government. The purpose of this study is to find out how the model collaborativ governance in institutional strengthening and implementation of Community-Based Environmental Arrangement in the District Ponorogo. The research method used is descriptive methodology with qualitative approach and data collection using interview and observai technique. The data analysis technique is done by using Miles Huberman theory which consists of data reduction, data presentation and conclusion. While the data validity using triangulation method.

Collaborativ Governance undertaken in the framework of institutional strengthening in the Cityless Without Program runs effectively and maximally. Collaboration is done between BKM personal, TIPP, local stakeholders including Village Government and also Facilitator Team in either through assistance or through cycle that is capacity building of society. In improving the capacity of the community, collaboration is also done with related agencies through sharing knoledge and programs related to the settlement environment. Collaborativ Governance implemented in the framework of the implementation of Community-Based Environmental Arrangement occurs well among all actors, stakeholders and communities. At the level of implementation of collaboration is also done with banking, companies and also other swata parties. Collaboration in this phase is complemented by a memorandum of understanding and an official document between BKM and KSM with collaborators.

Keywords : Collaborativ Governance, Town Without Slum, PLPBK, Institutional

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya, manusia diberikan pengetahuan dimana proses tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, manusia kemudian diciptakan menjadi makhluk yang sempurna diantara ciptaanNYA yang lain. Dalam proses pembelajaran ini, kemudian salah satunya menghasilkan Tugas Akhir berupa Skripsi. Dalam proses penyelesaian skripsi penulis merasa banyak terbantu oleh fihak-fihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara materiil maupun imateriil sehingga kiranya ucapan terimakasih bisa kami sematkan dalam skripsi ini. Ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Jusuf Harsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Robby Darwis Nasution, S.IP., MA sebagai ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Yusuf Adam Hilman S.IP., M.Si, sebagai pembimbing skripsi ini yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selalu memberikan ilmu dan nasehat yang bermanfaat sekali bagi saya untuk masa depan.
5. Semua pihak yang telah membantu yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan ini terima kasih atas dukungan kalian semuanya, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kepada kalian semua....Aamiin.

Demikianlah ucapan terimakasih ini kami haturkan, apabila ada salah kata dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum, Wr Wb

HERLAMBAANG SEPTA NUGRAHA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Herlambang Septa Nugraha

NIM : 14221344

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul : **“MODEL COLLABORATIV GOVERNANCE DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO”**

Adalah hasil karya saya dan naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo 6 Juni 2018

Yang menyatakan



HERLAMBAANG SEPTA NUGRAHA
NIM. 14221344

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penegasan Istilah	6
F. Landasan Teori	7
1. Konsep Collaborative Governance	7
a. Pengertian Kolaborasi	7
b. Syarat-Syarat Kolaborasi	8
c. Pengertian Governance	10
d. <i>Collaborative Governance</i>	10
e. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi	11
2. Konsep Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas	12
a. Pengertian dan Tujuan PLPBK	12
b. Strategi dan Keluaran PLPBK	13
c. Prinsip Pelaksanaan PLPBK	15
G. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. <i>Informan</i> Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Analisa Data	20
5. Uji Keabsahan Data	21

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Deskripsi Kota Ponorogo.....	23
1. Wilayah Administratif.....	24
2. Orientasi Wilayah.....	24
B. Gambaran Program Kota Tanpa Kumuh.....	25
3. Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh.....	25
4. Tujuan dan Capaian Program KOTAKU	26
5. Prinsip Program Kota tanpa Kumuh	27
6. Strategi Operasional.....	29
7. Indikator Kumuh.....	30
8. Struktur Manajemen Kota Tanpa Kumuh	31
9. Struktur Manajemen Kotaku Cluster 3 OSP 6.....	32
C. Pelaksanaan PLPBK Kotaku Kabupaten Ponorogo.....	36
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	
A. Penyajian Data.....	38
1. Karakteristik Informan Penelitian	38
2. <i>Collaborativ Governance</i> dalam Penguatan Kelembagaan	39
3. <i>Collaborativ Governance</i> dalam Pelaksanaan PLPBK di Wilayah Kabupaten Ponorogo	45
a. Penyiapan Internal.....	45
b. Inisiasi Kolaborasi dan Pelaksanaan Kolaborasi.....	56
c. Monitoring dan Evaluasi	62
B. Analisa Data.....	64
1. <i>Collaborativ Governance</i> dalam Penguatan Kelembagaan Program Kota Tanpa Kumuh di Wilayah Kabupaten Ponorogo.....	64
2. <i>Collaborativ Governance</i> dalam Pelaksanaan PLPBK Program Kota Tanpa Kumuh di Wilayah Kabupaten Ponorogo.....	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78-79

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 36
2. Tabel 3.1 Karakteristik Informan 38
3. Tabel 3.2 Pelaksanaan Kolaborasi dalam Penguatan Kelembagaan 68
4. Tabel 3.3 Pelaksanaan Kolaborasi dalam PLPBK 72



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Struktur BKM Manajemen Program.....	35
2. Gambar 2.2 Siklus PLPBK	37
3. Gambar 3.1 Kolaborasi Penguatan Kelembagaan	42
4. Gambar 3.2 Siklus Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi.....	44
5. Gambar 3.3 Sosialisasi Program	49
6. Gambar 3.4 TIPP dan Penguatan Kapasitas Masyarakat	52
7. Gambar 3.5 Kolaborasi Tahap Penyusunan Rencana	54
8. Gambar 3.6 Kolaborasi Pelaksanaan PLPBK.....	60
9. Gambar 3.7 Penyerahan Asset dan Pekerjaan.....	62
10. Gambar 3.8 Monitoring dan Evaluasi	63

